

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PASAR DAN RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pasar dan Retribusi Pasar dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana huruf a di atas sudah diadakan perubahan untuk yang ketiga kalinya, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kepala daerah adalah Bupati Lampung Selatan
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Pasar adalah suatu lahan atau lokasi yang ditentukan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli tertentu untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sitem pengelolaan baik oleh pemerintah, pihak ketiga, dan atau kerja sama antara keduanya.
- g. Unit Pasar adalah unsur pelaksana dari sebagian urusan dinas yang melaksanakan tugas pada unit tertentu.
- h. Bangunan Pasar adalah bangunan pasar yang dibangun atas instruksi presiden dan atau atas keuangan daerah yang merupakan tempat usaha, baik toko, los, dan hamparan serta tempat tinggal, maupun tempat-tempat usaha lainnya.
- i. Pasaran adalah aktifitas pertemuan antara penjual dan pembeli di lokasi pasar.
- j. Toko adalah suatu tempat penjualan barang yang kelayakannya representatif baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan.
- k. Kios adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya di bawah definisi toko.
- l. Los adalah suatu tempat penjualan barang dimana lokasi bangunannya terbuka serta permodalannya terbatas (bangunan disekat antara ruang satu dengan lainnya).
- m. Hamparan adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya di bawah kios dan los (sifatnya terbuka dan mobilitas kegiatan pedagangnya).
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II  
RETRIBUSI PASAR

Pasal 2

Semua pedagang tetap/hamparan yang berada di dalam pasar termasuk semua toko, kios, dan los yang berada di sekitar pasar dikenakan retribusi atas jasa pemeliharaan pasar.

#### Pasal 3

Besarnya retribusi pasar yang dikenakan untuk perdagangan adalah sebagai berikut:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| a. Yang menggunakan took     | Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) setiap hari. |
| b. Yang menggunakan Kios     | Rp 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari  |
| c. Yang menggunakan los      | Rp 500 (lima ratus rupiah)                       |
| d. Yang menggunakan hamparan | Rp 300 (tiga ratus rupiah) per hari.             |

### BAB III KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENYIDIDIKAN

#### Pasal 5

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pasar dan Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 8 tahun 1977 tentang Pasar dan Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda  
Pada Tanggal 30-10-2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda.  
Pada Tanggal 30 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2001